

SERING JADI TEMUAN BPK, SEKDA KOTA MATARAM PASTIKAN BANSOS TIDAK LAGI UANG TUNAI

Klipping Berita



TIDAK LAGI TERIMA UANG: Sejumlah masyarakat menunggu pembagian Bansos berupa uang di Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram, beberapa waktu lalu. (HARLI/LOMBOK POST)

LombokPost-Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk uang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Sehingga proses penyalurannya diubah.

”Sekarang tidak lagi dalam bentuk uang yang disalurkan. Tetapi, dalam bentuk barang,” kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri.

Menurutnya, jika Bansos disalurkan dalam bentuk barang lebih tepat penggunaannya. Terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

”Jelas juga nanti LPJ-nya (Laporan Pertanggungjawaban),” terangnya.

Namun, untuk penyaluran dalam bentuk uang ada pengecualiannya yang boleh dilakukan.

Misalnya, pemberian bantuan bagi orang miskin yang memang masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

”Ada juga untuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Penerapan penyaluran Bansos dalam bentuk barang itu dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Seperti, masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya.

”Kita bisa berikan alat untuk menunjang usahanya agar bisa lebih berkembang. Kalau diberikan uang, kita tidak tahu rimbanya,” kata dia.

Yang diperlukan saat ini adalah asas manfaat. Sehingga, tidak memberikan doktrin kepada masyarakat harus menunggu uang Bansos.

”Melainkan memberikan semangat kepada mereka untuk bergerak menjalankan bisnis,” ungkapnya.

Masing-masing OPD juga telah memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Seperti di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan bantuan modal usaha berupa alat penunjang kerja.

”Itu bagian dari cara kami turut memberantas kemiskinan di Kota Mataram,” tegasnya.

Pemkot Mataram juga sudah menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Mataram mengenai penyaluran dana Bansos. Semua diatur secara komprehensif.

”Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi terhadap penerima Bansos,” terangnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram Hj Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, penyaluran bansos dalam bentuk barang tersebut sesuai dengan arahan dari BPK. Tujuannya, agar penyalurannya tepat sasaran dan akuntabel.

”Semua sudah ditetapkan dalam Perwal terbaru tentang tata cara penyaluran Bansos. Itu bagian dari penegasan pak Wali,” kata Nelly. (arl/r3)